

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang *otonomi daerah* dan UU No. 25 tahun 1999 tentang *desentralisasi fiskal* telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya perubahan dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah (sidik, 2002:1). Kemudian adanya pembaharuan kebijakan melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang *pemerintah daerah* dan UU No. 33 tahun 2004 tentang *perimbangan keuangan antara pusat dan daerah*. dengan adanya undang-undang ini, memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi daerahnya dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat, dan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara (Mulyadi, 2005). Oleh karena itu setiap daerah mengelola pajak daerahnya. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD (kurniawan, 2006).

Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi penerimaan daerah yang beragam, khususnya Kota Malang, sudah sepatutnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan menggali potensi sumber penerimaan daerah tersebut harus diikuti penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak sehingga terciptanya efektivitas penerimaan pajak daerah. Dari adanya pajak daerah ini, Pemerintah Kota Malang melakukan pemungutan Pajak Daerah guna mendukung pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pengelolaannya di Kota Malang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan daerah nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kota Malang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, BPHTB, pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang perlu rasanya dilakukan penelitian tentang kinerja penerimaan pajak daerah di Kota Malang tahun 2009-2014 serta tidak dapat dipisahkan tingkat pertumbuhan selama 5 tahun sebagai

tahun dasar 2009 hingga 2014 dan kontribusi pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Rumusan masalah

- A. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Malang ?
- B. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah di Kota Malang selama 2009-2014 ?
- C. Berapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kota Malang 2009-2014.
3. Untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.

D. Manfaat penelitian

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang tepat.

2. Memberikan masukan dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah.
3. Dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya atau sebagai informasi data bagi peneliti yang mengambil topik yang sama

